

PEMBINGKAIAN BERITA DEMO MAHASISWA MENOLAK REVISI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

Linda Arfiana

Email : arfianalinda@gmail.com

Shinta Kristanty

Email : shintasoultan@yahoo.com

Fakultas Ilmu Komunikasi-Universitas Budi Luhur

ABSTRACT

This study aims to determine the framing of student demo news rejecting the revision of the Criminal Code on Kompas.com and Liputan6.com online media. The theory used in this research is Framing Robert M. Entman, and the concepts that complement include news and online media. The paradigm of this research is constructivism, the research approach is qualitative with the research method used is Framing Robert M. Entman. The results of the research are in the online media Kompas.com related to the news of the Student Demo Refusing to Revise the Criminal Code. Defining the problem is a legal problem. The source of the problem from all the news lies in the revision of the Criminal Code and the people involved in it. The moral decision contained in the news was that President Joko Widodo asked the DPR to postpone the ratification of four bills. The solution provided is that although the Criminal Code Bill is postponed by the Parliament and the government, it is hoped that the Criminal Code Bill remains a historical record in the course of this nation. While Liputan6.com is related to the news of the Student Demo Refusing the Criminal Code Revision. Defining the problem is a moral problem. The source of the problem from all the news lies in the revision of the Criminal Code and the people involved in it. The moral decision contained in the news was that Jakarta Legal Aid Foundation provided legal assistance to students who were secured by the Jakarta Police. The solution given by Liputan6.com is that students who are arrested by the police have the right to legal assistance and the principle of presumption of innocence must be put forward. There must be no violence, no torture.

Keywords: News, Student Demonstrations Refuse to Revise the Criminal Code.

PENDAHULUAN

Mahasiswa dari sejumlah kota menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI pada 23-24 September 2019. Massa mahasiswa yang berdemo di depan gedung DPR ini mendesak pemerintah menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). karena sejumlah pasal kontroversial di RUU KUHP yang dinilai bermasalah dan memantik demo ribuan mahasiswa di berbagai kota. Pembahasan RUU KUHP diselesaikan oleh Pemerintah dan DPR pada 15 September lalu. Pembahasan itu dilaksanakan pada 14-15 September 2019 di Hotel Fairmont, Jakarta. (Sumber: <https://tirto.id/mengapa-mahasiswa-demo-di-dpr-pasal-kontroversi-rkuhp-jadi-alasan-eiHT>, diakses pada 27/09/2019, pukul 20:28 WIB).

KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië. Pengesahannya dilakukan melalui Staatsblad Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Setelah kemerdekaan, KUHP tetap diberlakukan disertai penyesuaian kondisi berupa pencabutan pasal-pasal yang tidak lagi relevan. Hal ini berdasarkan pada Ketentuan Peralihan Pasal II UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "Segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung diberlakukan selama belum diadakan yang baru menurut Undang-

Undang Dasar ini." Ketentuan tersebutlah yang kemudian menjadi dasar hukum pemberlakuan semua peraturan perundang-undangan pada masa kolonial hingga pada masa kemerdekaan. (Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana#Sejarah, diakses pada 18/01/2020, pukul16:25 WIB).

RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disetujui Komisi III DPR RI untuk disahkan menjadi UU pada Rapat Paripurna DPR RI. Sejak mulai dibahas pada 2015 lalu, banyak isu krusial dalam RUU ini yang memakan waktu pembahasannya. Dengan segala kehati-hatian dan kajian mendalam, RUU KUHP sampai pula di penghujung pengesahan pada akhir periode keanggotaan 2014-2019. Persetujuan dan pengesahan RUU KUHP ini merupakan capaian fenomenal DPR dan pemerintah untuk mengganti fundamen hukum pidana peninggalan pemerintah Kolonial Belanda yang sudah ratusan tahun berlaku di Tanah Air. (Sumber: <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/25963/t/Komisi+III+Setujui+RUU+KUHP+Disahkan+di+Paripurna>, diakses pada 18/01/2020, pukul16:50 WIB).

Peneliti memilih berita tersebut karena berita tersebut menjadi polemik dan memiliki nilai berita ; 1). Penting (*Important*), berita tersebut melibatkan tokoh-tokoh elit politik. 2). Akibat (*Impact*), berita ini berdampak luas berita tersebut menjadi polemik. 3). Konflik (*Conflik*) berita ini menuai pro kontra. Berita tentang demo mahasiswa menolak revisi KUHP muncul di Kompas.com sebanyak 22 berita pada periode 23-25 September 2019, sedangkan berita tentang demo mahasiswa menolak revisi KUHP muncul di Liputan6.com muncul sebanyak 17 berita pada periode 23-25 September 2019.

Peneliti memilih media *online* Kompas.com dan Liputan6.com menurut data dari alexa.com Kompas.com menduduki peringkat ke-6 sedangkan Liputan6.com menduduki peringkat ke-7 pada bulan September 2019 (Sumber: www.alexacom, diakses pada 26/09/2019, pukul 13:05 WIB).

Setiap media *online* memiliki sudut pandang dan kepentingan tersendiri dalam menyikapi suatu masalah dan pada akhirnya

ikut berpengaruh juga terhadap penyajian informasi yang diberikan kepada masyarakat tanpa disadari media sudah mulai dijadikan alat untuk menjalankan kepentingan-kepentingan yang dapat mempengaruhi pembacanya.

Berita tentang demo mahasiswa menolak revisi KUHP akan dianalisis dengan *framing*. Peneliti memilih *framing* karena peneliti ingin membandingkan pembedaan pemberitaan di media *online* Kompas.com dengan Liputan6.com, bagaimana kedua media tersebut mengangkat kasus berita tentang demo mahasiswa menolak revisi KUHP dari berbagai aspek mulai dari kata maupun dari kalimat. Konsep *framing* Robert M. Entman digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. *Framing* dapat dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar dari pada isu yang lain (Eriyanto, 2011:220).

Dengan demikian peneliti mengangkat judul sebagai berikut: **"Pembedaan Berita Demo Mahasiswa Menolak Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Analisis *Framing* Robert M. Entman Pada Media *Online* Kompas.com dan Liputan6.com Edisi 23-25 September 2019)"**.

METODE PENELITIAN

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah konstruktivisme. Konstruktivisme secara ontologis, menyatakan bahwa realitas itu ada dalam beragam bentuk konstruksi mental yang didasarkan pada pengamatan sosial, bersifat lokal dan spesifik serta tergantung pada pihak yang melakukannya (Salim, 2006:71).

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Pendekatan kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial melalui perspektif dari partisipan. Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *human instrumen*, yaitu peneliti itu sendiri. Untuk menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu

bertanya, menganalisa, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna (Sugiyono, 2011:8).

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah analisis *framing*, Analisis *framing* yang peneliti gunakan adalah framing model Robert M. Entman. Pada dasarnya Entman membagi framing ke dalam dua dimensi besar yaitu seleksi isudari penekanan aspek atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas atau isu (Eriyanto, 2011:22).

Subjek dalam penelitian ini adalah media online Kompas.com dan Liputan6.com mengenai bagaimana cara media online Kompas.com dan Liputan6.com membingkai atau mengkonstruksi pemberitaan yang dituangkan dalam isi berita di media. Sedangkan Objek penelitian ini adalah teks berita dalam media online mengenai demo mahasiswa menolak revisi KUHP pada 23-25 September 2019. Teks berita yang menjadi objek penelitian adalah 22 berita dari media online Kompas.com dan 17 berita dari media online Liputan6.com.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Rahmat Kriyantono “teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan periset untuk mengumpulkan data” (Kriyantono, 2006:58).

Pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan dua sumber, yaitu:

OBSERVASI

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan pemusatan perhatian sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera (Arikunto, 2006: 133).

Pada penelitian ini peneliti mendapatkan data yang diperoleh dari berita Kompas.com dan Liputan6.com data yang diperoleh yaitu teks berita mengenai pemberitaan demo mahasiswa menolak revisi KUHP.

DOKUMENTASI

Pada penelitian ini peneliti mendapatkan data dengan cara pencatatan dan pengambilan

dokumen yang berkaitan dengan pemberitaan demo mahasiswa menolak revisi KUHP.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Membuat tabel untuk menentukan masing-masing berita dari Kompas.com dan Liputan6.com edisi 23-24 September 2019.
2. Membaca bena-benar semua berita yang telah dikumpulkan dari Kompas.com dan Liputan6.com, menandai kata-kata atau kalimat yang menunjukkan adanya penonjolan aspek disetiap beritanya.
3. Menentukan *Define problem* (pendefinisian masalah), *Diagnose causes* (memperkirakan masalah atau sumber masalah), *Make moral judgment* (membuat keputusan moral) dan *Threatment Recommendation* (menekankan penyelesaian).
4. Penonjolan aspek berupa penekanan kata. Mengartikan masing-masing kata yang memiliki unsur penonjolan aspek menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Lokasi dan waktu penelitian ini dilakukan di kediaman peneliti Jln Pondok Betung Raya Rt 10/003 no.78, Tangerang Selatan, Banten. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu bulan September-Desember 2019.

Validitas data dalam penelitian ini menggunakan validitas data dengan teknik triangulasi metode. Triangulasi Metode digunakan untuk mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan riset, triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan lebih dari teknik pengumpulan data untuk mendapatkan yang sama (Kriyantono, 2006:72-73).

HASIL PENELITIAN

Hasil Penelitian Kompas.com

A. Seleksi isu Kompas.com

Menurut Robert M. Entman, seleksi isu adalah aspek yang berhubungan dengan pemilihan fakta. Dari realitas yang kompleks dan beragama itu, aspek mana yang diseleksi untuk ditampilkan. Dari kasus ini selaku

terkandung di dalamnya ada bagian berita yang dimasukkan (*included*), tetapi ada juga berita yang dikeluarkan (*excluded*). Tidak semua aspek atau bagian dari isu ditampilkan, wartawan memilih aspek tertentu dari suatu isu.

Berdasarkan analisis seleksi isu yang dilakukan, dari 22 berita terkait demo mahasiswa menolak revisi KUHP, terdapat 8 berita menonjolkan isu moral, dan 12 berita menonjolkan isu hukum pada pemberitaan Kompas.com. Dari keseluruhan pemberitaan terkait demo mahasiswa menolak revisi KUHP pada periode 23-25 September 2019 yang di produksi oleh Kompas.com lebih menonjolkan dan mengarahkan ke isu hukum. Peneliti memilih 3 berita terkait berita demo mahasiswa menolak revisi KUHP untuk dianalisis menggunakan teori *framing* Robert M. Entman. Alasan peneliti memilih 3 berita tersebut, karena memberikan penonjolan isu yang paling banyak serta memenuhi unsur pembingkai empat elemen Robert M. Entman yaitu *Define Problems* (Pendefinisian Masalah), *Diagnose Cause* (Penyebab Masalah), *Make Moral Judgment* (Membuat Keputusan Moral) dan *Treatment Recommendation* (Penyelesaian Masalah).

OBJEK TEKS BERITA KOMPAS.COM YANG DIANALISIS

No	Judul Berita	Waktu
1	Pengesahan RUU Pemasysarakatan ditunda	24 September 2019
2	Ketua DPR: Kami sudah penuh tuntutan mahasiswa, pulanglah kerumah	24 September 2019
3	Tunda pengesahan 4 RUU, DPR punya waktu untuk mengkaji ulang	24 September 2019

B. Penonjolan Aspek

Peneliti menemukan beberapa penonjolan aspek dalam berita demomahasiswa menolak revisi KUHP yang dimuat oleh Kompas.com. Penonjolan aspek tersebut berupa kata, kalimat dan gambar.

Berikut penonjolan aspek berupa kata dan kalimat yang peneliti temukan dari berita yang mengarah ke isu hukum terkait berita tersebut, berikut penonjolan aspek kata:

Penonjolan Aspek Kompas.com

NO	KATA	FREKUENSI
1.	Tuntutan	2
3.	Aksi	4
4.	Pengesahan	5
5.	Menunda	6
6.	Revisi	3
7.	Mengkaji	2
8.	Aspirasi	5

Selain kalimat, peneliti juga menemukan salah satu gambar yang paling menonjol dimuat oleh Kompas.com yaitu gambar berisi foto Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat meminta sejumlah mahasiswa mengakhiri unjuk rasa yang digelar di depan gedung DPR dan sekitarnya.



(<https://nasional.kompas.com>, diakses pada 12/11/2019 pukul 16:58 WIB).

Kompas.com dalam pemberitaannya berjudul "Ketua DPR: Kami Sudah Penuhi Tuntutan Mahasiswa, Pulanglah Kerumah" Kompas.com memilih menggunakan gambar ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat memberikan pernyataan. Peneliti bermaksud agar khalayak dapat melihat isi dari pernyataan Bambang: "*Saya minta kepada teman-teman mahasiswa sebaiknya sudah cukup menyampaikan aspirasi yang disampaikan kepada kami, kembali ke rumah masing-masing karena kami sudah memenuhi tuntutan atau aspirasi yang disampaikan kepada kami di DPR*". Bambang mengatakan, DPR sudah memenuhi tuntutan mahasiswa dengan menunda pengesahan Rencana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Frame Kompas.com berita Demo mahasiswa menolak revisi KUHP

Define Problems	Masalah Hukum
Diagnose Caused	Mahasiswa menolak pengesahan RKUHP dan mendesak pembatalan UU KPK yang baru disahkan. Mahasiswa juga menolak RUU pertanahan, RUU pemasyarakatan, dan RUU Ketenagakerajaan
Make Moral Judgement	Presiden Joko Widodo meminta DPR untuk menunda pengesahan empat rancangan undang-undang. Selain Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sudah disampaikan sebelumnya, Jokowi meminta DPR menunda pengesahan RUU Pertanahan, RUU Minerba, dan RUU Pemasyarakatan
Treatment Recommendation	Walaupun RUU KUHP ini ditunda oleh DPR dan pemerintah, Kepala Badan Bela Negara FKPPi ini berharap RUU KUHP ini tetap menjadi catatan sejarah dalam perjalanan bangsa ini.

2. Hasil Penelitian Liputan6.com

A. Seleksi Isu Liputan6.com

Berdasarkan analisis seleksi isu yang dilakukan, dari 17 berita terkait demomahasiswa tolak KUHP, terdapat 12 berita menonjolkan isu moral, 1 berita menonjolkan isu politik, dan 4 berita

menonjolkan isu hukum pada pemberitaan Liputan6.com.

Dari keseluruhan pemberitaan terkait demomahasiswa menolak revisi KUHP pada periode 23-25 September 2019 yang di produksi oleh Liputan6.com lebih menonjolkan dan mengarahkan ke isu moral. Peneliti memilih 3 berita terkait berita demomahasiswa menolak revisi KUHP untuk dianalisis menggunakan teori framing Robert M. Entman. Alasan peneliti memilih 3 berita tersebut, karena memberikan penonjolan isu yang paling banyak serta memenuhi unsur pembingkai empat elemen Robert M. Entman yaitu *Define Problems* (Pendefinisian Masalah), *Diagnose Cause* (Penyebab Masalah), *Make Moral Judgment* (Membuat Keputusan Moral) dan *Treatment Recommendation* (Penyelesaian Masalah).

OBJEK BERITA LIPUTAN6.COM YANG DIANALISIS

No	Judul Berita	Waktu
1	Bubarkan Mahasiswa didepan DPR, Polisi tembakkan Gas Air Mata	24 September 2019
2	Moeldoko: Polisi Juga Tidak Ingin Bertindak Anarkis	25 September 2019
3	LBH Kecam Tindakan Represif Polisi Dalam Demo Mahasiswa	25 September 2019

B. Penonjolan Aspek Liputan6.com

Peneliti menemukan beberapa penonjolan aspek dalam berita demomahasiswa menolak revisi KUHP yang dimuat oleh Liputan6.com. Penonjolan aspek tersebut berupa kata, kalimat dan gambar. Berikut penonjolan aspek berupa kata dan kalimat yang peneliti temukan dari berita yang mengarah ke isu hukum terkait berita tersebut, berikut penonjolan aspek kata:

Penonjolan Aspek Liputan6.com

NO	KATA	FREKUENSI
1.	Mosi	2
2.	Aspirasi	3
3.	Anarkis	4
4.	Aksi	3

5.	Tindakan	5
6.	Represif	4
7.	Demo	5

Seleksi isu, Liputan6.com Isu yang dikembangkan oleh media Liputan6.com adalah demomahasiswa menolak revisi KUHP sebagai masalah moral.

Berdasarkan pada analisis 3 teks berita yang terdapat pada media *online* Kompas.com terkait “demomahasiswa menolak revisi KUHP periode 23-25 September 2019” melihat masalah ini sebagai moral.

Liputan6.com menonjolkan aspek yang ingin disampaikan kepada khalayak luas, menggunakan kalimat dengan kata-kata untuk mengkonstruksi dengan kata yang mampu membuat suatu opini dimasyarakat dalam setiap pemberitaannya.

Selain kalimat, peneliti juga menemukan salah satu gambar yang paling menonjol dimuat oleh Kompas.com yaitu gambar berisi foto Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberikan suara menyayangkan, aksi demonstrasi mahasiswa berujung tindakan anarkis.



(<https://www.liputan6.com/news/read>, diakses pada 08/10/2019 pukul 19:31 WIB).

Liputan6.com dalam pemberitaannya berjudul “Moeldoko: Polisi Juga Tidak Ingin Bertindak Anarkis” Kompas.com memilih menggunakan gambar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat memberikan keterangan. Peneliti bermaksud agar khalayak dapat melihat isi dari pernyataan Moeldoko “*Kalau sepanjang demo menyuarakan oke, kita enggak ada masalah. Tapi, jangan sampai demo itu memunculkan, satu tindakan anarkis*

yang merugikan semuanya, memunculkan rasa takut bagi semuanya, mengganggu publik,” tutur Moeldoko. Moeldoko mengingatkan, massa aksi agar tak melakukan tindakan anarkis saat melakukan demonstrasi.

Frame: Liputan6.com berita demo mahasiswa menolak revisi KUHP

Define Problems	Masalah Moral
Diagnose Caused	Menurut Moeldoko kelelahan merupakan salah satu penyebab aparat polisi akhirnya bertindak represif terhadap massa aksi. Untuk itu, Moeldoko meminta, agar para mahasiswa tak memaksa menggelar aksi hingga malam hari.
Make Moral Judgement	Tim advokasi kembali memverifikasi data mahasiswa yang di amankan oleh Polda Metro Jaya untuk diberi pendampingan hukum.
Treatment Rekomendasi	Arif menegaskan, para mahasiswa yang ditangkap polisi memiliki hak atas bantuan hukum dan prinsip praduga tidak bersalah harus dikedepankan. Tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada penyiksaan.

Dalam melihat sebuah peristiwa dan membuatnya menjadi sebuah teks berita, wartawan biasa mempunyai pembingkaihan yang berbeda-beda tentang pembingkaihan terkait Demo Mahasiswa Menolak Revisi KUHP. Setiap wartawan mempunyai pengalaman, preferensi, pendidikan tertentu dan lingkungan pergaulan atau sosial tertentu menafsirkan realitas dari peristiwa terkait demo mahasiswa menolak revisi KUHP dengan pembingkaiannya masing-masing.

Kompas.com lebih menonjolkan dan mengarahkan aspek hukum. Permasalahan hukum ini bicara mengenai regulasi. Bahwa regulasi ini berisi pasal-pasal yang

kontroversial. Sedangkan Liputan6.com lebih menonjolkan dan mengarahkan aspek moral. Hal ini bicara mengenai tindakan yang terkait dengan nilai benar atau salah.

Frame Kompas.com dan Liputan6.com

Elemen	Kompas.com	Liputan6.com
Define Problems (Pendefinisian Masalah)	Masalah Hukum	Masalah Moral
Diagnose Causes (Memperkirakan Masalah/Sumber Masalah)	Mahasiswa menolak pengesahan RKUHP dan mendesak pembatalan UU KPK yang baru disahkan. Mahasiswa juga menolak RUU pertanahan, RUU pelayaran, dan RUU Ketenagakerjaan	Menurut Moeldoko kelelahan merupakan salah satu penyebab aparat polisi akhirnya bertindak represif terhadap massa aksi. Untuk itu, Moeldoko meminta, agar para mahasiswa tak memaksa menggelar aksi hingga malam hari
Make Moral Judgement (Membuat Keputusan Moral)	Presiden Joko Widodo meminta DPR untuk menunda pengesahan empat rancangan undang-undang. Selain Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sudah disampaikan sebelumnya, Jokowi meminta DPR menunda	Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta memberikan pendampingan hukum pada mahasiswa yang di amankan oleh Polda Metro Jaya

	pengesahan RUU Pertanahan, RUU Minerba, dan RUU Pelayaran	
Treatment Recommendation (Menekan Penyelesaian)	Walaupun RUU KUHP ini ditunda oleh DPR dan pemerintah, Kepala Badan Bela Negara FKPPH ini berharap RUU KUHP ini tetap menjadi catatan sejarah dalam perjalanan bangsa ini	Arif menegaskan, para mahasiswa yang ditangkap polisi memiliki hak atas bantuan hukum dan prinsip praduga tidak bersalah harus dikedepankan. Tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada penyiksaan

KESIMPULAN

Setelah penulis menganalisa pemberitaan tentang demo mahasiswa menolak revisi KUHP pada media online Kompas.com dan Liputan6.com periode 23-25 September 2019 dengan menggunakan analisis framing Robert M. Entman, berikut kesimpulan yang dapat penulis peroleh yaitu:

- Media online Kompas.com dalam membingkai peristiwa terkait demo mahasiswa menolak revisi KUHP ini dimasukkan sebagai masalah hukum. Masalah hukum ini dipandang dari sudut pandang regulasi, memandang dalam sejumlah pasal revisi yang memuat pasal-pasal kontroversial dan memantik demo mahasiswa di berbagai kota. Masyarakat terkesan harus menerima regulasi ini. Walaupun ada penolakan, pemerintah menunda pasal-pasal terkait dengan revisi KUHP ini, jadi dapat dimaknai terkait dengan unsur-unsur yang bersikap normatif.

- b. Media *online* Liputan6.com dalam membingkai peristiwa terkait demo mahasiswa menolak revisi KUHP ini dimasukkan sebagai masalah moral, masalah moral ini dilihat dari pemberitaan mengenai polisi yang melakukan tindakan represif kepada demonstran dan ada pernyataan dari pejabat yang menyatakan tidak ingin bertindak represif kepada masa aksi. Hal ini bicara mengenai tindakan yang terkait dengan nilai benar atau salah meskipun masyarakat dibiarkan untuk menilai sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Eriyanto. 2011. *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: PT LKiS, Pelangi Aksara.
- Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknis Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Salim, Agus. 2006. *Teori & Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumber Online:

<https://tirto.id/mengapa-mahasiswa-demo-di-dpr-pasal-kontroversi-rkuhp-jadi-alasan-eiHT>, diakses pada 27/09/2019, pukul 20:28 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana#Sejarah, diakses pada 18/01/2020, pukul 16:25 WIB.

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/25963/t/Komisi+III+Setujui+RUU+KUHP+Disahkan+di+Paripurna>, diakses pada 18/01/2020, pukul 16:50 WIB.

www.alexacom, diakses pada 26/09/2019, pukul 13:05 WIB

<https://nasional.kompas.com>, diakses pada 12/11/2019 pukul 16:58 WIB.

(<https://www.liputan6.com/news/read>, diakses pada 08/10/2019 pukul 19:31 WIB.